SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN FORUM KOORDINASI PIMPINAN KECAMATAN (FORKOPIMCAM) DALAM MENANGANI KENAKALAN REMAJA DI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muh. Wahyu Amanda
NPP. 33.0929
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: wahyubone88c@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Baiq Aprimawati, SH, MH
Email: baiq@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *This study is based on the increasing phenomenon of juvenile delinquency in Awangpone District, Bone Regency, which is reflected in cases of brawls, illegal street racing, alcohol abuse, and truancy. Although the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the District Leadership Coordination Forum (Forkopimcam) have responsibilities in maintaining public order and social stability, studies specifically examining the synergy between these institutions in addressing juvenile delinquency at the district level remain limited. This research gap highlights the need to analyze how inter-institutional collaboration is implemented and optimized in dealing with juvenile delinquency.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the synergy between the Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the District Leadership Coordination Forum (Forkopimcam) in addressing juvenile delinquency in Awangpone District, identify the supporting and inhibiting factors affecting such synergy, and formulate an effective synergy model for juvenile delinquency management.* ***Method:*** *This study employs a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observations, and documentation involving informants from Satpol PP, Forkopimcam, community leaders, and youth representatives. Data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, and conclusion drawing. The study applies the Synergy Theory of Najiyati and Rahmat (2011), which consists of two dimensions: communication and coordination.* ***Result:*** *The findings reveal that the synergy between Satpol PP and Forkopimcam in addressing juvenile delinquency in Awangpone District has been relatively effective. Communication among institutions has generally been well established through information exchange, coordination meetings, and joint activities. In terms of coordination, collaborative efforts have been carried out through joint patrols, youth guidance programs, preventive measures, and repressive actions against delinquent behavior. However, several obstacles remain, including limited personnel, inadequate supporting facilities and infrastructure, the suboptimal involvement of Community Protection Units (Satlinmas), and uneven supervision in vulnerable areas.* ***Conclusion:*** *This study concludes that the synergy between Satpol PP and Forkopimcam in addressing juvenile delinquency in Awangpone District has been implemented relatively effectively through communication and coordination mechanisms. Nevertheless, improvements are still needed, particularly in strengthening institutional communication, enhancing resource support, optimizing stakeholder involvement, and developing a collaborative synergy model based on community participation to ensure more effective and sustainable juvenile delinquency management.*

Keywords: *Civil Service Police Unit; Forkopimcam; Juvenile Delinquency; Public Order; Synergy.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/*Research Gap*): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang ditandai dengan kasus tawuran, balap liar, konsumsi minuman keras, dan bolos sekolah. Permasalahan tersebut berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban dan keamanan wilayah. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis sinergitas kedua lembaga tersebut dalam menghadapi kenakalan remaja di tingkat kecamatan masih terbatas. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis berdasarkan Teori Sinergitas Najiyati dan Rahmat yang terdiri atas dimensi komunikasi dan koordinasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang berasal dari unsur Satpol PP, Forkopimcam, tokoh masyarakat, dan perwakilan remaja. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone telah berjalan cukup baik pada kedua dimensi. Pada dimensi komunikasi, terdapat pemahaman, kejelasan informasi, dan kepuasan kerja sama yang terbangun melalui koordinasi rutin dan pertukaran informasi antarinstansi. Sementara itu, pada dimensi koordinasi, sinergitas terlihat melalui kesatuan tindakan, kejelasan tujuan, pembagian kerja, dan disiplin dalam pelaksanaan patroli bersama, pembinaan remaja, serta upaya preventif dan represif terhadap perilaku menyimpang remaja. **Kesimpulan:** Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone telah berjalan cukup baik melalui komunikasi dan koordinasi yang mendukung penanganan kenakalan remaja secara terpadu.

Kata kunci: Forkopimcam; Kenakalan Remaja; Ketertiban Umum; Satpol PP; Sinergitas.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kenakalan remaja merupakan salah satu permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Fenomena ini tidak lagi terbatas pada pelanggaran norma ringan, tetapi telah berkembang menjadi tindakan yang berdampak terhadap keamanan masyarakat, seperti tawuran, konsumsi minuman keras, balap liar, dan tindak kekerasan. Kondisi tersebut memerlukan penanganan yang terintegrasi dari berbagai pihak karena melibatkan aspek sosial, pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Menurut (Eviany & Sutiyo, 2023), penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan pemerintah, aparat keamanan, serta partisipasi aktif masyarakat guna menciptakan kondisi sosial yang aman dan kondusif bagi kehidupan bermasyarakat. (Patchin et al., 2006) dan (Antunes & Manasse, 2021) menunjukkan bahwa paparan terhadap kekerasan dan disorganisasi sosial di lingkungan masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan meningkatnya perilaku delinkuen pada remaja.

Di tingkat kecamatan, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran strategis dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat. Forkopimcam berfungsi sebagai wadah koordinasi antarunsur pemerintahan, sedangkan Satpol PP berperan dalam penegakan Peraturan Daerah serta

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Sinergi kedua lembaga tersebut menjadi penting dalam upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja. (Ilham & Rahman, 2023) menjelaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sangat ditentukan oleh koordinasi lintas sektor serta kolaborasi antarinstansi pemerintah. Pandangan tersebut sejalan dengan berbagai penelitian internasional; (Sugimoto-Matsuda & Braun, 2014), (Dymnicki et al., 2020), dan (Payne & Button, 2008) yang menyimpulkan bahwa kolaborasi lintas sektor dan kemitraan antarorganisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan kebijakan pencegahan kekerasan dan kenakalan remaja.

Permasalahan kenakalan remaja juga terjadi di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat kasus kenakalan remaja berupa konsumsi minuman keras sebanyak 12 kasus, tawuran 5 kasus, balap liar 7 kasus, dan bolos sekolah 24 kasus. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa beberapa desa seperti Awo Lagading, Lappoase, dan Lattekko termasuk wilayah yang cukup rentan terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan tersebut masih menjadi tantangan serius bagi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan. Apabila tidak ditangani secara tepat, kenakalan remaja berpotensi berkembang menjadi konflik sosial yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. (Kusworo, 2019) menjelaskan bahwa konflik sosial yang tidak dikelola dengan baik dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih kompleks dan berdampak pada terganggunya kehidupan sosial masyarakat. Penelitian (Coster et al., 2016), dan (Weijters et al., 2009), menunjukkan bahwa faktor lingkungan, lemahnya kontrol sosial, rendahnya kohesi masyarakat, serta tingginya paparan kekerasan lingkungan merupakan faktor yang berkontribusi terhadap munculnya perilaku delinkuen pada remaja.

Selain itu, penelitian (Yudha & Chuemchit, 2024) pada remaja di Indonesia menunjukkan bahwa paparan kekerasan di lingkungan masyarakat masih menjadi persoalan yang nyata dan memiliki dampak terhadap perkembangan sosial serta perilaku remaja. Oleh karena itu, upaya penanganan kenakalan remaja tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergitas antarinstansi pemerintah, aparat keamanan, serta dukungan masyarakat. Meskipun Satpol PP dan Forkopimcam telah melakukan berbagai upaya penanganan, kajian yang secara khusus membahas sinergitas kedua lembaga dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan kenakalan remaja yang masih terjadi di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dan berpotensi mengganggu ketenteraman serta ketertiban umum masyarakat. Di sisi lain, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) memiliki tugas dan fungsi strategis dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum melalui upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, dan penanganan berbagai bentuk gangguan sosial. Namun demikian, kasus kenakalan remaja seperti konsumsi minuman keras, tawuran, balap liar, bolos sekolah, hingga tindak kekerasan yang melibatkan remaja masih ditemukan di Kecamatan Awangpone.

Salah satu permasalahan yang menjadi perhatian adalah tingginya jumlah remaja di Kecamatan Awangpone. Berdasarkan data hasil pengolahan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone dan pihak Kecamatan Awangpone, jumlah remaja di wilayah tersebut mencapai 3.997 jiwa yang tersebar di 17 desa dan 1 kelurahan. Jumlah remaja yang besar merupakan potensi pembangunan daerah, namun apabila tidak disertai pembinaan dan pengawasan yang memadai dapat menimbulkan berbagai bentuk perilaku menyimpang yang berpotensi mengganggu kehidupan sosial masyarakat.

Permasalahan berikutnya adalah masih tingginya kasus kenakalan remaja yang terjadi di Kecamatan Awangpone. Data tahun 2024 menunjukkan terdapat 12 kasus konsumsi minuman keras, 5 kasus tawuran, 7 kasus balap liar, dan 24 kasus bolos sekolah. Selain itu, hasil observasi awal menunjukkan bahwa beberapa desa seperti Awo Lagading, Lappoase, dan Lattekko merupakan wilayah yang cukup rentan terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja. Bahkan ditemukan kasus tindak kriminal berupa penikaman yang dilakukan oleh remaja di Desa Maccope. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenakalan remaja masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Faktor lingkungan pergaulan, lemahnya pengawasan keluarga, pengaruh kelompok sebaya, serta rendahnya kesadaran remaja terhadap norma sosial turut menjadi faktor yang mendorong munculnya perilaku menyimpang. Selain itu, kenakalan remaja yang terjadi tidak hanya berdampak pada pelaku dan korban, tetapi juga menimbulkan keresahan masyarakat serta mengganggu stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Awangpone.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas kenakalan remaja maupun peran Satpol PP dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji sinergitas antara Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja di tingkat kecamatan. Penelitian terdahulu umumnya lebih berfokus pada faktor penyebab kenakalan remaja atau peran masing-masing lembaga secara terpisah. Oleh karena itu, masih terdapat kesenjangan penelitian terkait bagaimana komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan Forkopimcam dibangun, dijalankan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sinergitas kedua lembaga tersebut dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan karena kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone masih menjadi permasalahan sosial yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat. Berbagai bentuk kenakalan remaja seperti konsumsi minuman keras, tawuran, balap liar, bolos sekolah, hingga tindak kekerasan yang melibatkan remaja menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak masih memerlukan penguatan. Kondisi tersebut menuntut adanya sinergitas yang efektif antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, ketenteraman, dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan.

Secara akademis, penelitian ini penting untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai sinergitas antarinstansi pemerintah dalam menghadapi permasalahan sosial di masyarakat, khususnya kenakalan remaja. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai penerapan teori sinergitas dalam konteks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di tingkat kecamatan, sekaligus menjadi bahan rujukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

Secara praktis, penelitian ini penting sebagai sumber informasi dan bahan evaluasi bagi Satpol PP, Forkopimcam, Pemerintah Kecamatan Awangpone, serta Pemerintah Kabupaten Bone dalam merumuskan strategi, kebijakan, dan program penanganan kenakalan remaja yang lebih efektif. Melalui penelitian ini, dapat diketahui bagaimana bentuk komunikasi dan koordinasi yang telah terjalin, faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat sinergitas, serta upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kenakalan remaja di wilayah Kecamatan Awangpone.

Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kepentingan akan mengalami keterbatasan informasi empiris mengenai kondisi aktual sinergitas antara Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja. Akibatnya, kebijakan dan program yang disusun berisiko kurang tepat sasaran karena tidak didasarkan pada kondisi faktual di lapangan. Selain itu, berbagai bentuk kenakalan remaja berpotensi terus berkembang dan menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum masyarakat, sehingga upaya pencegahan dan penanganannya menjadi kurang optimal dan berkelanjutan.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang membahas kenakalan remaja, peran pemerintah dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum, serta sinergitas dan koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penanganan kenakalan remaja tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat melalui komunikasi, koordinasi, pengawasan, serta pembinaan yang berkelanjutan.

(Amalia et al., 2021) meneliti pengawasan pemerintah dalam mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan pemerintah terhadap kenakalan remaja belum berjalan secara efektif karena kurang konsisten, tidak berkelanjutan, dan belum didukung tindak lanjut yang memadai. Penelitian tersebut menegaskan pentingnya keterlibatan pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku remaja agar tidak berkembang menjadi gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh (Syahputra, 2025) berjudul Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara Satpol PP dan Polresta Malang telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya kesepahaman mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dalam menangani kenakalan remaja. Selain itu, kegiatan patroli bersama, pertukaran informasi, dan pelaksanaan operasi gabungan menjadi faktor pendukung keberhasilan sinergitas kedua lembaga dalam menjaga ketertiban umum. Penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antarinstansi keamanan memiliki peran penting dalam penanganan kenakalan remaja di wilayah perkotaan.

Selanjutnya, (Rompas et al., 2022) meneliti peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Kawangkoan dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dan koordinasi yang terjalin antaranggota Forkopimcam berjalan efektif dan mampu mendukung keberhasilan penanganan pandemi di tingkat kecamatan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Forkopimcam memiliki kapasitas sebagai forum koordinasi lintas sektor yang mampu menyatukan berbagai unsur pemerintahan dan keamanan dalam menghadapi permasalahan masyarakat.

Penelitian berikutnya dilakukan oleh (Suhendi, 2019) mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran penting dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penegakan ketertiban umum sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah. Efektivitas pelaksanaan tugas tersebut dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan masyarakat terhadap penegakan peraturan daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh (Angkasawati & Rinawati, 2020) mengenai peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam pembinaan kenakalan remaja dan pelajar di Kabupaten Tulungagung menggunakan metode kualitatif deskriptif menunjukkan bahwa Satpol PP memiliki peran penting

dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pencegahan kenakalan remaja melalui kegiatan sosialisasi, patroli, serta kerja sama dengan pihak sekolah dan keluarga. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan remaja tidak hanya ditentukan oleh tindakan aparat, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan tingkat kesadaran remaja.

Penelitian lain dilakukan oleh (Wiredarme & Isra, 2026) mengenai kontrol sosial Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi kenakalan remaja di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau menggunakan metode kualitatif deskriptif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Satpol PP berperan sebagai agen kontrol sosial melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, razia, dan koordinasi dengan berbagai pihak dalam menangani kenakalan remaja, khususnya penyalahgunaan minuman keras. Penelitian tersebut juga menemukan bahwa efektivitas penanganan kenakalan remaja dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya dan kondisi lingkungan sosial masyarakat.

Secara umum, penelitian-penelitian terdahulu didominasi oleh metode kualitatif dengan fokus pada pengawasan pemerintah, peran Satpol PP, sinergitas antarinstansi keamanan, koordinasi Forkopimcam, serta pembinaan dan pengendalian kenakalan remaja. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa komunikasi, koordinasi, pengawasan, dan kolaborasi antarinstansi merupakan faktor penting dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam menghadapi kenakalan remaja di tingkat kecamatan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada objek, teori, dan aktor yang diteliti. Penelitian (Syahputra, 2025) mengkaji sinergitas Satpol PP dan Kepolisian, sedangkan penelitian ini mengkaji sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam yang melibatkan unsur pemerintah kecamatan, kepolisian, TNI, dan instansi terkait lainnya. Penelitian (Rompas et al., 2022) berfokus pada penanganan pandemi COVID-19, sedangkan penelitian ini berfokus pada kenakalan remaja. Sementara itu, penelitian (Amalia et al., 2021), (Suhendi, 2019), (Angkasawati & Rinawati, 2020), serta (Wiredarme & Isra, 2026) lebih menitikberatkan pada peran dan fungsi Satpol PP atau pemerintah secara umum, bukan pada aspek sinergitas antarlembaga. Selain itu, penelitian ini menggunakan Teori Sinergitas Najiyati dan Rahmat (2011) yang menitikberatkan pada dimensi komunikasi dan koordinasi sebagai alat analisis utama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baru dalam pengembangan kajian sinergitas antarinstansi pemerintah dalam menghadapi kenakalan remaja di tingkat kecamatan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum ditemukan secara spesifik pada penelitian-penelitian terdahulu. Kebaruan penelitian ini dapat dilihat dari aspek objek penelitian, pendekatan teoritis, konteks kebijakan, dan karakteristik lokus penelitian yang digunakan. Dari aspek objek penelitian, penelitian ini berfokus pada sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas pengawasan pemerintah terhadap kenakalan remaja, sinergitas antara Satpol PP dan kepolisian, maupun peran Forkopimcam dalam penanganan pandemi COVID-19, penelitian ini secara khusus mengkaji hubungan kerja sama antara Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi permasalahan kenakalan remaja yang berdampak pada ketenteraman dan ketertiban umum.

Dari aspek teoritis, penelitian ini menggunakan Teori Sinergitas Najiyati dan Rahmat (2011) yang menitikberatkan pada dua dimensi utama, yaitu komunikasi dan koordinasi. Penggunaan teori tersebut berbeda dengan sebagian penelitian terdahulu yang lebih banyak menggunakan konsep pengawasan, kolaborasi umum, maupun pendekatan kelembagaan dalam menganalisis hubungan antarorganisasi. Melalui teori ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam

mengenai bagaimana komunikasi dan koordinasi antarlembaga dibangun dalam menghadapi kenakalan remaja di tingkat kecamatan.

Dari aspek kebijakan, penelitian ini mengkaji sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam dalam konteks implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Kebijakan tersebut relatif baru sehingga masih terbatas penelitian yang menggunakannya sebagai landasan dalam menganalisis peran dan fungsi Forkopimcam dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat kecamatan.

Selain itu, kebaruan penelitian ini juga terletak pada karakteristik lokus penelitian yang berada di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Penelitian ini tidak hanya mengkaji peran satu institusi secara terpisah, tetapi menelaah sinergitas antarunsur pemerintahan dan keamanan pada tingkat kecamatan dalam menghadapi permasalahan sosial yang kompleks, yaitu kenakalan remaja. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah baru dalam pengembangan kajian sinergitas antarinstansi pemerintah serta menjadi referensi bagi upaya peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum melalui penanganan kenakalan remaja di tingkat kecamatan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada tujuan penelitian yang ingin memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Pendekatan ini dipilih karena fenomena sinergitas antarlembaga tidak dapat diukur hanya melalui angka, melainkan perlu dipahami melalui proses komunikasi, koordinasi, interaksi, serta pengalaman para pihak yang terlibat secara langsung dalam penanganan kenakalan remaja.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan tingkat keterlibatan dan pemahaman mereka terhadap permasalahan yang diteliti. Informan terdiri atas unsur Satpol PP Kabupaten Bone, Camat Awangpone, unsur Kepolisian Sektor Awangpone, unsur Komando Rayon Militer Awangpone, tokoh masyarakat, serta perwakilan remaja. Camat Awangpone ditetapkan sebagai informan kunci karena memiliki peran sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan sekaligus memimpin pelaksanaan koordinasi dalam Forkopimcam. Sementara itu, Satpol PP, Polsek, Koramil, tokoh masyarakat, dan perwakilan remaja dipilih untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan sinergitas dari perspektif pelaksana, pengawas, maupun kelompok sasaran.

Keabsahan data diuji melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Uji kredibilitas dilakukan dengan triangulasi sumber melalui perbandingan informasi dari berbagai informan, triangulasi teknik melalui perbandingan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta member check kepada informan untuk memastikan kesesuaian data dengan kondisi sebenarnya. Uji dependabilitas dan konfirmabilitas dilakukan melalui pencatatan seluruh proses penelitian secara sistematis sehingga hasil penelitian dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan berdasarkan Teori Sinergitas Najiyati dan Rahmat (2011) yang terdiri atas dua dimensi, yaitu komunikasi dan koordinasi. Melalui analisis tersebut, peneliti dapat menggambarkan tingkat sinergitas yang terjalin antara Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan wilayah dengan tingkat kerawanan kenakalan remaja yang cukup tinggi dibandingkan beberapa kecamatan lainnya di Kabupaten Bone. Pengumpulan data dilakukan selama kurang lebih dua bulan, yaitu pada bulan Februari hingga Maret 2025, yang meliputi observasi lapangan, wawancara mendalam dengan informan, serta pengumpulan dokumen pendukung. Dengan rentang waktu tersebut, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang aktual mengenai sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone menggunakan Teori Sinergitas Najiyati dan Rahmat (2011) yang menyatakan bahwa sinergitas organisasi dapat diukur melalui dua dimensi utama, yaitu komunikasi dan koordinasi. Kedua dimensi tersebut menjadi dasar untuk melihat sejauh mana kerja sama antara Satpol PP dan Forkopimcam mampu mendukung penanganan kenakalan remaja di wilayah Kecamatan Awangpone.

3.1. Komunikasi

Penulis melakukan analisis terhadap dimensi komunikasi dalam sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) melalui aspek pertukaran informasi, intensitas komunikasi, dan penyampaian informasi terkait penanganan kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone.

Tabel 1.
Hasil Pengukuran Dimensi Komunikasi

Indikator	Temuan Lapangan
Intensitas komunikasi antarinstansi	Dilaksanakan secara rutin melalui rapat koordinasi dan komunikasi informal
Pertukaran informasi	Berjalan melalui laporan masyarakat, pemerintah desa, kepolisian, dan Satpol PP
Media komunikasi	Telepon, grup WhatsApp, surat pemberitahuan, dan rapat koordinasi
Kecepatan penyampaian informasi	Relatif cepat terutama pada kasus yang berpotensi mengganggu ketertiban umum
Keterlibatan instansi	Satpol PP, Kecamatan, Polsek, Koramil, pemerintah desa, dan tokoh masyarakat

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 1, komunikasi antarinstansi dalam penanganan kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone menunjukkan kondisi yang cukup baik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa komunikasi dilakukan secara rutin melalui rapat koordinasi maupun komunikasi informal menggunakan media telepon dan grup WhatsApp. Selain itu, informasi mengenai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum diperoleh dari berbagai sumber, seperti laporan masyarakat, pemerintah desa, kepolisian, dan Satpol PP.

Hasil wawancara dengan Camat Awangpone selaku Ketua Forkopimcam menyatakan bahwa: “Komunikasi antarunsur Forkopimcam dilakukan secara rutin baik melalui rapat maupun komunikasi

langsung apabila terdapat permasalahan yang membutuhkan penanganan segera, termasuk kasus kenakalan remaja."

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kepala Seksi Operasional Satpol PP Kabupaten Bone yang menyatakan bahwa: "Informasi mengenai balap liar, tawuran, maupun konsumsi minuman keras biasanya diperoleh dari masyarakat atau pemerintah desa yang kemudian kami tindak lanjuti melalui koordinasi dengan unsur Forkopimcam."

Hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa komunikasi tidak hanya dilakukan ketika terjadi gangguan ketertiban, tetapi juga dilaksanakan pada kegiatan sosialisasi, pembinaan pelajar, serta patroli gabungan. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan adanya notulen rapat koordinasi dan surat pemberitahuan kegiatan yang melibatkan unsur Forkopimcam dan Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa komunikasi antara Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone telah berjalan cukup baik karena mampu mendukung pertukaran informasi dan mempercepat proses pengambilan keputusan.

3.2. Koordinasi

Penulis melakukan analisis terhadap dimensi koordinasi dalam sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan melalui aspek pembagian tugas, pelaksanaan kegiatan bersama, dan kesesuaian tindakan antarinstansi dalam menghadapi kenakalan remaja.

Tabel 2.
Hasil Pengukuran Dimensi Koordinasi

Indikator	Temuan Lapangan
Pembagian tugas	Dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi
Patroli gabungan	Dilaksanakan secara berkala pada lokasi rawan kenakalan remaja
Kegiatan pembinaan	Melibatkan Satpol PP, Kecamatan, Kepolisian, Koramil, dan sekolah
Monitoring wilayah rawan	Dilaksanakan bersama melalui patroli dan pengawasan lapangan
Efektivitas koordinasi	Membantu mempercepat penanganan gangguan ketertiban masyarakat

Sumber: Hasil pengolahan data penelitian tahun 2026.

Berdasarkan Tabel 2, koordinasi antara Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja menunjukkan hasil yang cukup efektif. Koordinasi dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas antara pemerintah kecamatan, Satpol PP, kepolisian, Koramil, pemerintah desa, dan unsur masyarakat.

Hasil wawancara dengan Camat Awangpone menunjukkan bahwa: "Setiap unsur memiliki tugas masing-masing. Kecamatan berperan sebagai koordinator, Satpol PP melakukan penertiban dan pembinaan, sedangkan pihak kepolisian menangani aspek hukum dan keamanan."

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama pihak Polsek Awangpone yang menyatakan bahwa: "Patroli gabungan maupun operasi penertiban dilakukan berdasarkan hasil koordinasi sebelumnya sehingga setiap instansi memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing."

Hasil observasi menunjukkan bahwa koordinasi diwujudkan melalui kegiatan patroli gabungan, sosialisasi di sekolah, pembinaan terhadap remaja yang terjaring razia, serta monitoring pada lokasi yang dianggap rawan terjadi kenakalan remaja. Dokumentasi penelitian juga menunjukkan keterlibatan unsur Forkopimcam dalam berbagai operasi gabungan yang bertujuan menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa koordinasi antara Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone telah berjalan cukup efektif karena mampu menyatukan tindakan berbagai instansi sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.

3.3. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum apabila tidak ditangani secara tepat. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone telah berjalan cukup baik. Sinergitas tersebut tercermin melalui komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan, adanya pertukaran informasi antarinstansi, pelaksanaan rapat koordinasi, patroli bersama, kegiatan pembinaan remaja, serta pelaksanaan tindakan preventif dan represif terhadap berbagai bentuk kenakalan remaja seperti balap liar, konsumsi minuman keras, tawuran, dan bolos sekolah.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa komunikasi menjadi faktor penting dalam membangun sinergitas antarlembaga. Melalui komunikasi yang baik, setiap unsur Forkopimcam dan Satpol PP dapat memahami tugas, tanggung jawab, serta langkah yang harus dilakukan dalam menghadapi kenakalan remaja. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Syahputra, 2025) yang menemukan bahwa komunikasi antara Satpol PP dan Kepolisian Resor Kota Malang berjalan dengan baik sehingga menciptakan kesepahaman mengenai tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi dalam penertiban kenakalan remaja. Kesamaan temuan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi merupakan unsur utama dalam membangun sinergitas antarinstansi, baik di tingkat kota maupun kecamatan.

Selain komunikasi, penelitian ini juga menemukan bahwa koordinasi menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan penanganan kenakalan remaja. Koordinasi yang dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, patroli gabungan, sosialisasi ke sekolah, serta pembinaan kepada remaja terbukti mampu meningkatkan efektivitas penanganan berbagai bentuk kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone. Temuan ini sama halnya dengan penelitian (Rompas et al., 2022) yang menemukan bahwa koordinasi yang terjalin dalam Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kawangkoan mampu mendukung keberhasilan penanganan pandemi COVID-19 melalui kerja sama lintas sektor. Meskipun objek penelitian berbeda, kedua penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif merupakan kunci keberhasilan penyelesaian berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian (Angkasawati & Rinawati, 2020) yang menyatakan bahwa peran Satpol PP dalam pembinaan kenakalan remaja tidak hanya dilakukan melalui penertiban, tetapi juga melalui sosialisasi, pengawasan, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Dalam penelitian ini, Satpol PP tidak hanya melakukan tindakan penertiban terhadap remaja yang melakukan pelanggaran, tetapi juga terlibat dalam kegiatan pembinaan bersama unsur Forkopimcam untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja secara berulang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendekatan preventif dan persuasif masih menjadi strategi yang relevan dalam menghadapi kenakalan remaja.

Temuan penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian (Wiredarme & Isra, 2026) yang menemukan bahwa Satpol PP berfungsi sebagai agen kontrol sosial dalam menanggulangi kenakalan remaja melalui kegiatan pengawasan, pembinaan, dan koordinasi dengan berbagai pihak. Penelitian di Kecamatan Awangpone menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial tersebut tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP, tetapi juga melibatkan Forkopimcam, pemerintah desa, tokoh masyarakat,

serta unsur keamanan lainnya sehingga penanganan kenakalan remaja dapat dilakukan secara lebih komprehensif.

Di sisi lain, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian (Amalia et al., 2021) yang menemukan bahwa pengawasan pemerintah dalam mengatasi kenakalan remaja di Kelurahan Batuputih Bawah belum berjalan efektif karena kurang konsisten dan belum dilakukan secara berkelanjutan. Pada penelitian ini, komunikasi dan koordinasi yang dibangun antara Satpol PP dan Forkopimcam relatif lebih terstruktur karena didukung oleh mekanisme koordinasi lintas sektor yang telah berjalan di tingkat kecamatan. Perbedaan hasil tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh karakteristik objek penelitian, struktur kelembagaan, serta tingkat keterlibatan berbagai pihak dalam penanganan kenakalan remaja.

Penulis juga menemukan bahwa keberhasilan sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja tidak hanya ditentukan oleh komunikasi dan koordinasi formal, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat dalam memberikan informasi, pengawasan lingkungan, dan dukungan terhadap program pembinaan remaja. Temuan ini menunjukkan bahwa penanganan kenakalan remaja memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang saling mendukung.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam di Kecamatan Awangpone telah berjalan cukup baik dalam menghadapi kenakalan remaja. Temuan ini memperkuat berbagai penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antarinstansi merupakan faktor utama dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Namun demikian, penelitian ini juga memberikan kebaruan karena menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Forkopimcam pada tingkat kecamatan dapat menjadi model kolaborasi yang efektif dalam menghadapi kenakalan remaja melalui penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor sesuai dengan Teori Sinergitas Najiyati dan Rahmat (2011).

3.4. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Selain temuan utama yang berkaitan dengan komunikasi dan koordinasi sebagai dimensi sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), penulis juga menemukan beberapa temuan menarik yang memengaruhi pelaksanaan sinergitas dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone.

Penulis menemukan bahwa salah satu faktor yang mendukung sinergitas adalah adanya komitmen bersama dari unsur Forkopimcam dan Satpol PP untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Awangpone. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan patroli gabungan, rapat koordinasi rutin, kegiatan sosialisasi kepada pelajar, serta pembinaan terhadap remaja yang terlibat dalam berbagai bentuk kenakalan. Kesamaan tujuan antarinstansi tersebut memudahkan proses komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Temuan menarik lainnya adalah adanya partisipasi masyarakat yang cukup baik dalam mendukung penanganan kenakalan remaja. Masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan pemerintah desa turut memberikan informasi mengenai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dilakukan oleh remaja. Keterlibatan masyarakat tersebut membantu Satpol PP dan Forkopimcam dalam melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum terjadi pelanggaran yang lebih besar.

Di sisi lain, penulis juga menemukan beberapa kendala yang masih dihadapi dalam pelaksanaan sinergitas. Keterbatasan jumlah personel Satpol PP menyebabkan pengawasan terhadap seluruh wilayah Kecamatan Awangpone belum dapat dilakukan secara optimal, terutama pada lokasi-lokasi yang sering dijadikan tempat berkumpulnya remaja pada malam hari. Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan patroli dan pengawasan harus dilakukan secara bergantian berdasarkan tingkat kerawanan wilayah.

Selain keterbatasan personel, sarana dan prasarana pendukung juga masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan penanganan kenakalan remaja. Ketersediaan kendaraan operasional, fasilitas komunikasi, dan perlengkapan penunjang kegiatan lapangan masih terbatas dibandingkan dengan luas wilayah pengawasan yang harus dijangkau. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan patroli dan kegiatan pembinaan di lapangan.

Penulis juga menemukan bahwa pengaruh lingkungan sosial dan pergaulan remaja masih menjadi faktor yang memicu terjadinya kenakalan remaja. Meskipun berbagai upaya pembinaan telah dilakukan, sebagian remaja masih terpengaruh oleh lingkungan pergaulan yang kurang baik, sehingga berpotensi melakukan tindakan yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum seperti balap liar, konsumsi minuman keras, maupun tawuran.

Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja tidak hanya ditentukan oleh komunikasi dan koordinasi antarlembaga, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan masyarakat, ketersediaan sumber daya, serta kondisi lingkungan sosial remaja. Oleh karena itu, diperlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar upaya pencegahan dan penanganan kenakalan remaja dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone telah berjalan cukup baik. Hal tersebut ditunjukkan melalui komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan serta koordinasi yang terjalin antara Satpol PP, pemerintah kecamatan, kepolisian, TNI, pemerintah desa, dan unsur masyarakat dalam melaksanakan patroli, pembinaan, sosialisasi, serta penanganan berbagai bentuk kenakalan remaja. Sinergitas yang terbangun mampu mendukung upaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan Awangpone.

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar komunikasi dan koordinasi antarlembaga terus ditingkatkan melalui pelaksanaan rapat koordinasi yang lebih intensif, penguatan pertukaran informasi, serta optimalisasi keterlibatan seluruh unsur Forkopimcam dalam kegiatan pencegahan dan penanganan kenakalan remaja. Selain itu, perlu adanya peningkatan kerja sama dengan sekolah, keluarga, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan agar upaya pembinaan remaja dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup penelitian yang hanya dilakukan di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone sehingga hasil penelitian belum tentu dapat menggambarkan kondisi sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam di wilayah lain yang memiliki karakteristik sosial dan tingkat kenakalan remaja yang berbeda. Selain itu, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan penulis hanya dapat mengamati pelaksanaan sinergitas dalam periode tertentu sehingga belum mampu menggambarkan perkembangan sinergitas secara berkelanjutan dalam jangka panjang.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa penelitian mengenai sinergitas Satpol PP dan Forkopimcam dalam menghadapi kenakalan remaja masih dapat dikembangkan lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar penelitian berikutnya dilakukan pada beberapa kecamatan atau kabupaten yang berbeda sehingga dapat diperoleh perbandingan mengenai pola sinergitas yang diterapkan dalam menghadapi kenakalan remaja. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji keterlibatan unsur masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kepemudaan dalam

mendukung sinergitas antarlembaga guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penanganan kenakalan remaja dan pemeliharaan ketenteraman serta ketertiban umum.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bone, Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) Awangpone, Polsek Awangpone, Koramil Awangpone, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta seluruh informan yang telah bersedia memberikan data, informasi, dan pengalaman yang dibutuhkan selama proses penelitian berlangsung.

Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), para dosen pembimbing, penguji, serta seluruh pihak yang telah memberikan arahan, masukan, dan dukungan selama penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga, sahabat, dan rekan-rekan yang senantiasa memberikan motivasi dan bantuan sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Akhirnya, penulis menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian mengenai sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dalam menghadapi kenakalan remaja di Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone. Semoga segala bantuan dan dukungan yang diberikan mendapatkan balasan yang setimpal.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Amalia, M. M. S., Rompas, W. Y., & Tampi, G. B. (2021). *Pengawasan Pemerintah dalam Mengatasi Kenakalan Remaja di Kelurahan Batuputih Bawah Kecamatan Ranowulu Kota Bitung*. *VII*(103), 50–56. https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/view/33607

Angkasawati, & Rinawati. (2020). *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Pembinaan Kenakalan Remaja/Pelajar di Kabupaten Tulungagung*. *13*(2), 89–105. https://doi.org/10.36563/p.vxx.ixx.xxx

Antunes, M. J. L., & Manasse, M. (2021). *Social Disorganization and Strain: Macro and Micro Implications for Youth Violence*. *59*(1). https://doi.org/10.1177/00224278211004667

Coster, S. De, Heimer, K., & Wittrock, S. M. (2016). *Neighborhood Disadvantage, Social Capital, Street Context, and Youth Violence*. *47*(4), 723–753. https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2006.00064.x

Dymnicki, A. B., Katz, J., & Lumpkin, C. D. (2020). *Supporting Local Health Departments to Lead Multisectoral Youth Violence Prevention Efforts*. *22*(6). https://doi.org/10.1177/1524839920947766

Eviany, E., & Sutiyo. (2023). *Perlindungan Masyarakat*. http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1251/1/Sutiyo Eva perlindungan masyarakat.pdf

Ilham, M., & Rahman, A. (2023). *Praktik Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*. https://ejournal.amertamedia.co.id/index.php/press/article/view/400/231

Kusworo. (2019). *Manajemen Konflik & Perubahan Dalam Organisasi*.

Patchin, J. W., Huebner, B. M., & Bynum, T. S. (2006). *Exposure to Community Violence and Childhood Delinquency*. *52*. https://doi.org/10.1177/0011128704267476

Payne, B. K., & Button, D. M. (2008). *Developing a Citywide Youth Violence Prevention Plan: Perceptions of Various Stakeholders*. *53*(5). https://doi.org/10.1177/0306624X08321868

Rompas, K., Lapian, M. T., & Pangemanan, S. E. (2022). *Peran Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Kawangkoan dalam Memutus Mata Rantai Penyebaran Covid-19*. *2*(1), 1–14.

https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/40139
Sugimoto-Matsuda, J. J., & Braun, K. L. (2014). *The role of collaboration in facilitating policy change in youth violence prevention: a review of the literature*. https://doi.org/10.1007/s11121-013-0369-7
Suhendi, D. (2019). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (Studi terhadap Penerapan Standar Operasional Prosedur Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat). *Jurnal Tatapamong*, *1*(1), 35–47. https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v1i1.1145
Syahputra, A. Z. (2025). *Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Kota dalam Penertiban Kenakalan Remaja di Kota Malang*. 1–9. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/21666
Weijters, G., Scheepers, P., & Gerris, J. (2009). *City and/or Neighbourhood Determinants?: Studying Contextual Effects on Youth Delinquency*. *6*(5). https://doi.org/10.1177/1477370809337883
Wiredarme, M., & Isra, A. I. (2026). *Kontrol Sosial Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau*. 4907–4917. https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/6115
Yudha, A. N., & Chuemchit, M. (2024). *Experiences of Community Violence Among Adolescents in Indonesia*. *December*, 1–16. https://doi.org/10.1177/21582440241284607